



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 7 Juli 2021

Nomor : 509/KOM.03/PIAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Hak Akses
DWH Terpusat Bagi Lembaga
Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI
di
J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi :

1. Anggota kelompok dan/atau perorangan calon penerima izin akses legal perhutanan sosial;
2. Warga masyarakat dalam proses penegakan hukum;
3. Pengusul perizinan pemanfaatan dan pengguna Kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengpul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi; dan
4. Proses pelayanan penerima bantuan pemerintahan bidang kehutanan. dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data *Warehouse* (DWH) Terpusat, yang terdiri dari :

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Permohonan Persetujuan Akses *User ID* Admin OPD;
4. Surat Perintah Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; dan
5. Surat Permohonan *User ID Development* dan Admin dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/*approval* Hak Akses terhadap DWH Terpusat untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 444/PMD.07.01/Disdukcapil
2668/HK.01.01/Sekre

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Duapuluh Satu (18-6-2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : **Jalan Ciumbuleuit No. 2 Bandung**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP.**
Alamat : **Jalan Soekarno-Hatta No. 751 Km. 11,2**
Jabatan : **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 470/Kep.914 – Disdukcapil/2017 tentang Izin Pemanfaatan Dan Pemberian Hak Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/2546/Dukcapil tanggal 23 Februari 2021 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data :

1. anggota kelompok dan/atau perorangan calon penerima izin akses legal perhutanan sosial;
2. warga masyarakat dalam proses penegakan hukum;
3. pengusul perizinan pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi; dan
4. proses pelayanan penerima bantuan pemerintahan bidang kehutanan. oleh **PIHAK KEDUA**, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa : Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan, dan Alamat Sekarang, kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Induk Kependudukan;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
 - c. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data :
 - data penerima bantuan bidang kehutanan;
 - nomor izin akses legal perhutanan sosial;
 - nomor penerima izin pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi
 - keterangan status hukum dalam proses penegakan hukum kehutanan. sebagai **DATA BALIKAN**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan verifikasi dan validasi data :
 - anggota kelompok dan/atau perorangan calon penerima izin akses legal perhutanan sosial;
 - warga masyarakat dalam proses penegakan hukum;
 - pengusul perizinan pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi; dan
 - proses pelayanan penerima bantuan pemerintahan bidang kehutanan. yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berbasis KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el (apabila diperlukan), sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module* (SAM);
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **Hak PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan **DATA BALIKAN** berupa :
 - data penerima bantuan bidang kehutanan;
 - nomor izin akses legal perhutanan sosial;

- nomor penerima izin pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi
 - keterangan status hukum dalam proses penegakan hukum kehutanan. dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas atas data kependudukan berupa :
 - Nomor Kartu Keluarga;
 - Nomor Induk Kependudukan;
 - Nama Lengkap;
 - Jenis Kelamin;
 - Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - Status Perkawinan;
 - Jenis Pekerjaan; dan
 - Alamat Sekarang.
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain=Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001



Ir. EPI KUSTIAWAN, M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620317 198603 1 009



**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP
ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 445/PMD.07.01/Disdukcapil
2669/PK.03.02.09/Sekre

Hal	Petunjuk teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 444/PMD.07.01/Disdukcapil dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2668/HK.01.01/Sekre Tanggal 18 Juni 2021 dalam hal ini digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK.
Tanggal	18 Juni 2021
Tempat	Di Bandung
Para Pihak	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

URAIAN PEMBAHASAN

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none">a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, menggunakan jaringan tertutup dengan besaran bandwidth 10 Mbps, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.b. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan permintaan IP <i>Address Local</i> (IP LAN) yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memberikan IP LAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat setelah proses administrasi selesai.d. Estimasi uji koneksi jaringan komunikasi data antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan dilakukan oleh masing-masing Tim Teknis, segera setelah Petunjuk Teknis ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2.	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>;b. Dalam rangka implementasi akses <i>Web Portal</i>, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Permohonan Pengajuan <i>User ID</i> kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait persetujuan kuota aksesnya;c. Penyerahan nama <i>User ID</i> kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat segera setelah Permohonan Persetujuan Akses <i>User Admin</i> OPD diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan kuota akses sebanyak 50 akses Hit NIK per hari;d. Kolom permohonan <i>User ID (Single User)</i> dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">1. Nomor Induk Kependudukan2. Nama Lengkap3. Nomor Identitas Pegawai

		<p>4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna *Permohonan <i>User ID</i> yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap</p> <p>e. <i>Output</i> dari huruf e adalah <i>username</i> dan <i>password</i>; f. Penanggung jawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah unsur Pimpinan (pejabat struktural yang berwenang) pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>Single User ID</i> tersebut; g. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Nomor : 470/2546/Dukcapil Tanggal 23 Februari 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Nomor Kartu Keluarga</i> 2. <i>NIK*</i> 3. <i>Nama Lengkap*</i> 4. <i>Jenis Kelamin*</i> 5. <i>Tempat Lahir*</i> 6. <i>Tanggal/Bulan/Tahun Lahir*</i> 7. <i>Status Perkawinan*</i> 8. <i>Jenis Pekerjaan*</i> 9. <i>Alamat*</i> <p>(<i>Alamat, Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Kode Desa/Kelurahan, Nama Desa/Kelurahan, Kode Pos, RT, RW</i>)</p> <p>*) Data wajib terisi</p> <p>h. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas penggunaan <i>Web Portal</i> kependudukan untuk keperluan Sinkronisasi, Verifikasi dan Validasi 1) anggota kelompok dan/atau perorangan calon penerima izin akses legal perhutanan sosial; 2) proses penegakkan hukum; 3) perizinan pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi; 4) proses pelayanan penerima bantuan pemerintahan bidang kehutanan Sesuai dengan tujuan pemanfaatan data); i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengecekan secara teknis terkait pemanfaatan data kependudukan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari <i>Data Warehouse</i> Terpusat melalui <i>Web Portal</i>; dan k. Pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat adalah berdasarkan NIK.</p>
3.	Data Balikan	<p>a. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan Data Balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa 1) data penerima bantuan bidang kehutanan; 2) nomor izin akses legal perhutanan sosial; 3) nomor penerima izin pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi; 4) keterangan status hukum dalam</p>

		<p>proses penegakkan hukum kehutanan (sesuai isi Lampiran Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Nomor : 470/2546/Dukcapil Tanggal 23 Februari 2021, dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web service</i> adalah sebagaimana terlampir;</p> <p>c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan pengiriman Data Balikan dari hasil hak akses data kependudukan melalui Aplikasi Data Balikan;</p> <p>d. Dalam Aplikasi Data Balikan terdapat 3 (tiga) metode pengiriman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload</i> Data Excel atau <i>CSV</i>; 2. Metode <i>Form Online</i>; dan 3. Metode <i>Web service</i>. <p>e. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman Data Balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode 1) <i>Upload Data Excel/CSV</i>; dan 2) Metode <i>Form Online</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (Flasdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</p>
4.	Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el	<p>a. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el;</p> <p>c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id;</p> <p>d. <i>User Id</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini;</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; dan</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP-el.</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id;</p> <p>c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Kehutanan Provinsi</p>

		<p>Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan PARA PIHAK;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RIDAFARIDA, S.Sos. (08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. REZA FAIZAL PRATAMA A.Md (082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 3. ENDANG SUSANTO ST. (085659699939) Tenaga Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat <p>Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RAHMAT HIDAYAT, S.S.T., M.P., M.H. (085295526587) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2. SUMIADI, S.Hut. (085220038814) Pengelola Data pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 3. NUR HIDAYAT, S.Kom. (089622814512) Tenaga Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;</p> <p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;</p> <p>f. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ke alamat Jalan Ciembuleuit No. 2 Bandung, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;</p> <p>g. Dalam hal Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat akan mencabut hak akses data kependudukan; dan</p> <p>h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.</p>

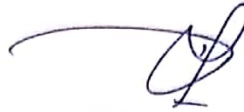
TIM TEKNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,



RAHMAT HIDAYAT, S.S.T., M.P., M.H.
NIP. 19740623 199603 1 001

MENGETAHUI

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,



H. EPI KUSTAWAN, M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620317 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 7 Juli 2021

Nomor : 510/KOM.03/PIAK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Akses
User ID Lembaga Pengguna

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri RI
di

J A K A R T A

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan akses *User ID* Admin Lembaga Pengguna untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Nomor 2787/KH.03.01.03/Sekr Tanggal 2 Juli 2021 Hal Permohonan Akses *DWH* Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (terlampir) sebagai berikut :

Nama : Ir. EPI KUSTIAWAN, MP.
NIK : 3273011703620002
NIP : 19620317 198603 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Jumlah kuota yang dimohon : 50 hit per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak dihaturkan terimakasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan :

Yth. Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor.751 Km.11,2 Telp. (022) 7304027, 7304031
Faksimil:(022)7304031 Website:www.dishut.jabarprov.go.id Email:dishut@jabarprov.go.id
Bandung - 40292

Bandung, 2 Juli 2021

Nomor : 2787/KH.03.01.03/Sekr
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Akses DWH
Terpusat Pemanfaatan Data
Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
di -
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan *User ID Development* dan Admin untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Nama : Ir. EPI KUSTIAWAN, MP.
NIK : 3273011703620002
NIP : 19620317 198603 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Jumlah Kuota Akses : 50 akses Hit NIK per hari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP
Pembina Utama Madya

Lampiran Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Nomor : 2787/KH.03.01.03/Sekr

Tanggal : 23 Juli 2021

Hal : Permohonan Akses DWH Terpusat Pemanfaatan Data Kependudukan

AKSES KUOTA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN KTP-eI PER HARI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KUOTA PER HARI	KETERANGAN
1.	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	50 akses Hit NIK per hari	

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP
Pembina Utama Madya



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Nomor : 470/2546/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat


Jakarta, 23 Februari 2021
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
di Bandung

Memperhatikan surat Saudara Nomor 21/DC.02.01/Disdukcapil tanggal 13 Januari 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan Ijin Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran surat ini.

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal 5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH



LAMPIRAN

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 470/2546/Dukcapil

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA PENGGUNA	TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	ELEMEN DATA YANG DIAKSES	METODE AKSES	DATA BALIKAN	JANGKA WAKTU
1	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat	verifikasi dan validasi: 1) anggota kelompok dan/atau perorangan calon penerima izin akses legal perhutanan sosial 2) proses penegakan hukum 3) perizinan pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi 4) proses pelayanan penerima bantuan pemerintahan bidang kehutanan;	1. No. KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Status Perkawinan 8. Jenis Pekerjaan 9. Alamat Sekarang	1. <i>Web Portal</i> (call_NIK) melalui jaringan tertutup 2. Penggunaan <i>Card Reader</i>	1) data penerima bantuan bidang kehutanan; 2) Nomor izin akses legal perhutanan sosial 3) nomor penerima izin pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan, pengada/pengedar benih/bibit tanaman hutan, sumber benih dan pengepul/pengedar tumbuhan dan satwa tidak dilindungi 4) keterangan status hukum dalam proses penegakkan hukum kehutanan	2 (dua) tahun sejak ditandatangani PKS

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor.751 Km.11,2 Telp. (022) 7304027, 7304031
Faksimil:(022)7304031 Website:www.dishut.jabarprov.go.id Email:dishut@jabarprov.go.id
Bandung - 40292

Bandung, 23 Juni 2021

Nomor : 2717/KH.03.01.03/Sekr
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan IP LAN Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

di -
BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses terhadap data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan permohonan IP LAN untuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam rangka akses jaringan komunikasi data tertutup antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:

Demikian hal ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. H. EPI KUSTIAWAN, MP
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telp. (022) 2031044 – 2031045 Fax. (022) 2031045
website : www.jabarprov.go.id, e-mail: dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40132

SURAT PERINTAH NOMOR 55/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

MEMERINTAHKAN

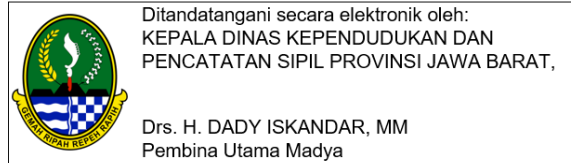
- KEPADA : 1. Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina / IV-b
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
2. Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III-d
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
3. Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : 19731109 200701 1 005
NIP : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Analis Kerjasama
4. Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur / II-c
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
5. Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan
Jabatan :

- UNTUK : 1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna (Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia) di Jawa Barat secara

- berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat;
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 28 Januari 2020

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
{Pembina Utama Madya}
NIP.19620923 198810 1 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jalan Soekarno - Hatta Nomor 751 Km. 11,2 Telp. (022) 7304027, 7304031,
Faksimil : (022) 7304031 Website : www.dishut.jabarprov.go.id E-mail : dishut@jabarprov.go.id
Bandung - 40292

SURAT PERINTAH

NOMOR : 0530/KPB.11.01/504r

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 03/DC.02.02/PIAK Hal Penyesuaian Naskah Kerjasama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Tanggal 4 Januari 2021

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
1. Nama : Ahmad Ade Hadeansyah, ST., M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
NIP : 19710401 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris
 2. Nama : Rahmat Hidayat, S.S.T., M.P., M.H.
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
NIP : 19740623 199603 1 001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Nama : Sumiadi, S.Hut.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III d
NIP : 19750207 199903 1 002
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 4. Nama : Nur Hidayat, S.Kom.
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Teknologi Informasi

- UNTUK :
1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; dan
 2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 1 Maret 2021

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT,


EPI KUSTIAWAN, MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620317 198603 1 009